



DAMPAK INFLASI APRIL 2025 TERHADAP PEREKONOMIAN DAN STRATEGI MENGATASINYA

Edmira Rivani*

Abstrak

Inflasi tahunan Indonesia pada April 2025 tercatat 1,95% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya. Namun jauh lebih rendah dibanding April 2024. Inflasi ini tercatat sebesar 1,82% (yoy), mengindikasikan bahwa tekanan harga masih terkendali di luar komoditas yang sangat fluktuatif. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor pendorong inflasi dan menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta strategi mengatasinya. Kenaikan tarif listrik, harga emas perhiasan, dan pangan, seperti bawang merah dan cabai merah, menjadi penyebab utama inflasi, meskipun inflasi ini tetap terkendali di 1,82%. Dampak paling signifikan dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah, yang berisiko menurunkan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 5,75%, sementara pemerintah memperkuat distribusi pangan dan bantuan sosial. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Komisi XI DPR RI berperan strategis dalam fungsi pengawasan dan alokasi anggaran guna memastikan efektivitas perlindungan sosial dan pengendalian inflasi.

Pendahuluan

Inflasi merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas perekonomian. Pada April 2025, inflasi tahunan Indonesia naik menjadi 1,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,01% (yoy), namun jauh lebih rendah dibandingkan April 2024 yang mencapai 4,33% (Badan Pusat Statistik, 2025). Secara bulanan, inflasi tercatat 1,17% (*month to month*/mtm), turun dari Maret yang sebesar 1,65% (mtm) (Annasa, 2025). Inflasi ini tercatat sebesar 1,82% (yoy), mengindikasikan tekanan harga masih terkendali di luar komoditas yang sangat fluktuatif.

Kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) adalah mempertahankan BI Rate pada 5,75% guna menstabilkan nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Pemerintah melalui kebijakan fiskal memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga harga melalui koordinasi antarinstansi, termasuk peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tulisan ini akan membahas faktor penyebab inflasi April 2025 dan strategi menganalisis dampaknya terhadap daya beli serta ekonomi makro.

*) Analisis Legislatif Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. E-mail: edmira.rivani@dpr.go.id

Faktor Penyebab Inflasi pada April 2025

Inflasi bulan April sebesar 1,17% (mtm) mencerminkan perlambatan pasca-Ramadhan, sejalan dengan pola musiman lima tahun terakhir. Secara teoritis, inflasi yang terjadi dalam konteks musiman dapat dikaitkan dengan fluktuasi sisi permintaan, terutama menjelang dan sesudah hari besar keagamaan, di mana konsumsi rumah tangga meningkat tajam dan kemudian menurun, sesuai dengan model permintaan *agregat* dalam teori makroekonomi (Mankiw, 2020). Peningkatan konsumsi ini sementara mendorong kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).

Penyumbang utama inflasi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, dengan andil inflasi sebesar 0,98%. Tarif listrik melonjak 26,99% dengan andil 0,97% akibat berakhirnya diskon 50% tarif pelanggan pascabayar. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga menyumbang inflasi dengan andil 0,16% (sebesar 2,46%), terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan, yang mencatat inflasi tertinggi dalam 20 bulan terakhir, sejalan dengan harga emas dunia. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatat inflasi 0,07% dengan andil 0,02%. Komoditas penyumbang utama termasuk bawang merah, cabai merah, dan tomat. Sebaliknya, harga cabai rawit, daging ayam, dan telur mengalami penurunan yang membantu meredam tekanan. Namun, secara tahunan, kelompok ini tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,64%, didorong oleh kopi bubuk, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin (SKM) (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain tekanan domestik, *imported inflation* juga menjadi faktor penting. Pelemahan nilai tukar rupiah sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan pengetatan kebijakan moneter di negara maju menyebabkan kenaikan harga barang impor seperti gandum dan beras. Mekanisme ini dijelaskan dalam kerangka transmisi kebijakan moneter, di mana perubahan suku bunga acuan (BI Rate) akan memengaruhi nilai tukar, yang pada akhirnya memengaruhi harga barang impor dan inflasi domestik (Mishkin, 2019). Kenaikan harga pangan global memperkuat tekanan *imported inflation*, terutama pada komoditas pokok yang masih bergantung pada impor.

Selain faktor domestik dan *imported inflation*, ekspektasi inflasi masyarakat juga berperan dalam membentuk tekanan harga. Menurut hasil survei BI, ekspektasi inflasi konsumen tetap terjaga, meskipun terdapat kekhawatiran atas kenaikan harga pangan dan energi. Namun, jika persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga semakin menguat, hal ini dapat mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual lebih awal, yang berpotensi menciptakan tekanan inflasi tambahan (BI, 2025). Oleh karena itu, menjaga komunikasi publik yang efektif dan transparan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi yang holistik.

Dampak Inflasi terhadap Perekonomian dan Strategi Mengatasinya

Inflasi yang tinggi, khususnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Survei Konsumen BI menunjukkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap prospek ekonomi serta kecenderungan menunda konsumsi barang tahan lama (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini menurunkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB nasional. Jika tekanan inflasi terus menekan konsumsi maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dalam APBN 2025 akan semakin sulit untuk dicapai.

Selain menurunkan permintaan domestik, inflasi juga berdampak pada penerimaan negara, khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika daya beli masyarakat melemah dan konsumsi menurun maka penerimaan PPN pun akan ikut tergerus. Hal ini dapat memperlebar defisit fiskal yang dalam APBN 2025 dirancang sebesar 2,29% dari PDB. Walaupun inflasi pada April 2025 masih berada dalam kisaran target BI, yaitu $2,5\% \pm 1\%$, tekanan tetap datang dari sisi volatilitas harga energi dan pangan global, serta distribusi dampaknya yang tidak merata di dalam negeri. Pekerja informal dan buruh harian merasakan beban lebih besar karena pendapatan mereka tidak meningkat sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, penguatan program perlindungan sosial dan percepatan digitalisasi sistem logistik nasional menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Dalam jangka menengah, upaya pengendalian inflasi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian guna menekan inflasi pangan, penguatan cadangan pangan strategis untuk mendukung efektivitas intervensi pasar, serta pemberian insentif fiskal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja tetap terjaga di tengah tekanan biaya. Di sisi lain, inflasi yang berlangsung secara berkepanjangan juga dapat menimbulkan tekanan terhadap sektor keuangan, terutama melalui peningkatan risiko kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL), khususnya pada segmen kredit konsumsi dan mikro. Ketika daya beli menurun dan konsumsi melambat, kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangan menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas aset perbankan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat inflasi tinggi (KSSK, 2025).

Menghadapi risiko ini, peran Otoritas Jasa Keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan restrukturisasi kredit yang fleksibel serta penguatan penilaian risiko berbasis wilayah dan sektor. Di samping itu, perlu dukungan pemerintah berupa fasilitas pembiayaan kepada sektor produktif agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh dan berkelanjutan serta sasaran fiskal dalam APBN tetap dapat dicapai.

Respons Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi

BI tetap mempertahankan BI Rate di 5,75% sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Intervensi di pasar valas juga diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meredam *imported inflation* (BI, 2025). Selain itu, komunikasi kebijakan diperkuat melalui edukasi publik tentang stabilitas harga, terutama selama periode Ramadhan dan Idulfitri. Namun, kebijakan moneter memiliki keterbatasan dalam mengatasi tekanan inflasi yang bersumber dari penawaran, seperti distribusi pangan dan harga komoditas global.

Pemerintah menempuh kebijakan stabilisasi harga dengan memperkuat ketersediaan pasokan melalui operasi pasar, cadangan beras pemerintah (CBP), dan subsidi distribusi pangan. Koordinasi lintas lembaga dilakukan oleh TPIP–TPID, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Pertanian. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur logistik dan ketidakmerataan distribusi masih menghambat efektivitas kebijakan (KSSK, 2025). Pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial tunai dan subsidi energi untuk menjaga daya beli kelompok rentan. Dalam konteks inflasi April 2025, langkah ini berperan sebagai bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terdampak lonjakan harga pangan dan energi.

Di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi stabilitas makroekonomi domestik, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Dalam Rapat Berkala KSSK II tahun 2025, pemerintah menekankan respons kebijakan diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap mengendalikan inflasi dalam sasaran yang ditetapkan. Fokus diarahkan pada efektivitas belanja negara, terutama program ketahanan pangan, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, dan perlindungan sosial (KSSK, 2025). Di sisi lain, BI juga terus memperluas kerja sama dengan otoritas regional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan program digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung kelancaran distribusi pangan serta memperkuat stabilitas harga di daerah (BI, 2025). Pendekatan terintegrasi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan inflasi yang bersifat kompleks dan multisektor.

Penutup

Inflasi April 2025 mencerminkan tekanan musiman pascaramadhan, *imported inflation* akibat depresiasi rupiah, serta penyesuaian tarif domestik. Meski masih dalam rentang target BI, tekanan ini dapat menggerus daya beli kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, sinergi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan pemerintah daerah menjadi kunci menjaga stabilitas makroekonomi serta mencegah kontraksi konsumsi rumah tangga. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program seperti GNPIP, operasi pasar, dan bantuan sosial perlu berbasis data *real-time*, dengan pelibatan aktif pemerintah daerah untuk respon kebijakan yang tepat sasaran.

Ke depan, penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor termasuk pelaku usaha, asosiasi produsen, dan platform logistik digital perlu diperluas guna mempercepat respon terhadap gejolak harga. Reformasi struktural di sektor pangan dan energi harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan ketahanan nasional. Komisi XI DPR RI berperan strategis dalam pengawasan anggaran perlindungan sosial dan penetapan alokasi fiskal yang responsif terhadap tekanan harga.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2025, Mei 2). Berita resmi statistik: Inflasi April 2025. [bps.go.id.https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/05/02/2429/inflasi-year-on-year-y-on-y-april-2025-sebesar-1-95-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/05/02/2429/inflasi-year-on-year-y-on-y-april-2025-sebesar-1-95-persen.html)
- Bank Indonesia. (2025, April 24). Rapat Dewan Gubernur BI April 2025. [bi.go.id.https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_278425.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_278425.aspx)
- Kamalina, Annasa. (2025, Mei 2). Breaking: Inflasi April 2025 capai 1,95%. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250502/9/1873746/breaking-inflasi-april-2025-capai-195>
- Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2025, April 24). Hasil Rapat Berkala KSSK II 2025. *Kemenkeu.go.id*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Hasil-Rapat-Berkala-KSSK-II-2025>
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Macroeconomics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (2025, April 24). BI dan TPID se-Sumatera mantapkan komitmen pengendalian inflasi lewat GNPIP 2025. *Indexsumut.com*. <https://indexsumut.com/2025/04/24/bi-dan-tpid-se-sumatera-mantapkan-komitmen-pengendalian-inflasi-lewat-gnpip-2025>

